MENDORONG PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH MELALUI FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

Masruri Muchtar, Haris Suganda

Jurusan kepabeanan dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Banten, 15222
E-mail: masruri.m@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[18-02-2021]

Revisi
[29- 03-2021]

Tanggal terima
[23-05-2021]

***ABSTRACT*:**

Globalization is an opportunity for small and medium industries (IKM) in Indonesia to be able to market various products they produce. One of the facilities provided by the government is the Ease of Import for Export Purposes (KITE IKM). This study aims to identify some issues that arise, conduct analysis, and provide alternative solutions to those constraints that occur in the utilization of KITE IKM in the KPPBC TMP B Yogyakarta. This research uses a qualitative research approach in the form of case studies. Based on the results, there are still some obstacles in fosteringg the growth of IKM. Internal are related to the efforts to disseminate KITE IKM, good governance practices particularly in archiving of customs documents, technical competence of employees, and implementation of risk management. External consist of the IKM's compliance on the procedures or provisions and strategic coordination between related agencies or institutions. This research implies that some policies need to be made to improve governance and risk mitigation. The object of research is limited to IKM at KPPBC TMP B Yogyakarta which conducts import and export activities through the nearest port. Subsequent research can be carried out on other customs offices with different characteristics.

***Keywords*:** *duty drawback, export, facility, good governance*

ABSTRAK:

Dengan adanya globalisasi, luasnya jangkauan pasar menjadi peluang bagi para industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia dalam memasarkan berbagai produk yang dihasilkan. Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah kepada IKM adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul, melakukan analisis, dan memberikan alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi atas pemanfaatan fasilitas KITE IKM di wilayah kerja KPPBC TMP B Yogyakarta. Studi ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan beberapa hambatan dalam mendorong tumbuhnya IKM. Permasalahan internal terkait kurang gencar dan luasnya upaya sosialisasi dan edukasi fasilitas KITE IKM, lemahnya tata kelola atau pengarsipan dokumen kepabeanan, belum meratanya pengetahuan dan kompetensi teknis pegawai, dan kurang optimalnya penerapan manajemen risiko. Permasalahan eksternal terkait kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha atas prosedur atau ketentuan dan belum efektifnya sinergi dan koordinasi strategis antarinstansi atau lembaga. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan terkait perlu dilakukan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi penerapan manajemen risiko. Objek penelitian terbatas hanya terhadap IKM terdaftar penerima fasilitas KITE di KPPBC TMP B Yogyakarta yang melakukan kegiatan impor dan ekspor melalui pelabuhan terdekat. Penelitian berikutnya dapat dilakukan terhadap objek penelitian yang berbeda karakteristiknya.

Kata Kunci: ekspor, fasilitas, KITE, tata kelola, UMKM

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perdagangan internasional semakin berkembang terutama ketika negara-negara mulai banyak membuka diri untuk menerima produk-produk dari luar negeri (Kerr & Gaisford, 2012). Pada era globalisasi yang seolah-olah tidak ada pembatas antarnegara, perdagangan antarnegara menjadi salah satu isu penting dan strategis. Teknologi internet dimanfaatkan sebagai cara pemasaran yang dianggap efektif karena jangkauan yang tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Pelaku usaha yang termasuk kategori kecil dan menengah bisa menggunakannya untuk meningkatkan jangkauan pasar, baik tingkat nasional maupun internasional (Djamaludin *et al*., 2016). Luasnya jangkauan pasar menjadi peluang bagi para industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia untuk bisa memasarkan berbagai produk yang dihasilkan, baik itu berupa kerajinan kayu, perak, kulit, kertas, tanah liat, bambu, batu, sampai dengan produk tekstil dan mebel atau furnitur. Pemerintah perlu mendukung industri tertentu dalam negeri untuk bisa berkompetisi di pasar internasional melalui pemberian insentif atau kemudahan fiskal berupa instrumen kebijakan tarif impor (Batavia & Nandakumar, 2017).

Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah kepada IKM adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Berdasarkan PMK Nomor 110/PMK.04/2019, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut KITE IKM adalah kemudahan berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan barang dan/atau bahan untuk diproses lebih lanjut, dirangkai, atau digabung dengan barang lain dengan maksud untuk diekspor. Sederhananya, KITE IKM merupakan kemudahan atau fasilitas berupa fiskal dan prosedural yang ditawarkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) guna meningkatkan volume ekspor Indonesia.

Fasilitas fiskal dari KITE IKM berupa pembebasan Bea Masuk, PPN, dan PPnBM atas importasi bahan baku, mesin dan barang contoh oleh industri kecil dan menengah. Fasilitas prosedural KITE IKM berupa ketidakharusan untuk memberikan jaminan atas pembebasan (dalam batasan

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

tertentu), kegiatan impor yang dapat melalui pusat logistik berikat (PLB), pemberian akses kepabeanan, ketersediaan aplikasi pencatatan dan pelaporan, serta fleksibilitas sebesar 25% untuk dijual dalam negeri dari total nilai ekspor selama lima tahun terakhir. Pada awal 2020, pengguna fasilitas KITE didominasi oleh IKM jenis barang kerajinan dan *furniture* dengan jumlah masing-masing 21 badan usaha. Terdapat 11 IKM tekstil dan produk tekstil, 7 IKM produk rambut palsu, 2 IKM produk kosmetik dan 10 IKM produksi lain-lain (DJBC, 2020). Jumlah ini masih terus bergerak walaupun masih jauh dibandingkan dengan keberadaan jumlah IKM di Indonesia.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah berkontribusi kepada produk domestic bruto (PDB) sebesar 60% dan turut serta andil sebesar 14% pada ekspor nasional (Suryowati, 2020). Kontribusi UMKM dalam penjualan pasar internasional atau ekspor yang hanya kurang lebih 14%, sangat berbeda dengan negara-negara Asia-Pasifik lainnya yang sudah cukup besar. Alasan dikeluarkannya fasilitas KITE IKM adalah terkait komponen biaya impor bahan baku seperti bea masuk (BM) dan pajak-pajak dalam rangka impor (PDRI). Fasilitas ini diberikan agar biaya produksi turun serta pendapatan meningkat yang mendorong daya saing dan produktivitas IKM (Mumpuni, 2019).

Dengan adanya fasilitas KITE IKM, industri kecil dan menengah yang akan mengimpor bahan baku, mesin, serta barang contoh dapat dibebaskan dari kewajiban membayar BM, dan tidak dipungut PPN atau PPnBM. Dampak dari hal tersebut adalah IKM dapat menjual barang lebih murah sehingga bisa bersaing di pasar global. Dari adanya KITE IKM tersebut, diharapkan industri kecil dan menengah mampu menyasar dan berkompetisi dalam pasar internasional sehingga dapat meningkatkan devisa nasional.

Telah dilakukan pengukuran kemanfaatan pemberian fasilitas Kawasan berikat (KB) dan KITE dengan hasil, di antaranya adalah kontribusi nilai ekspor menyentuh lebih dari Rp780 triliun, yaitu 34,37% ekspor nasional dan total tenaga kerja terserap sejumlah 1,95 juta. Nilai tambah terhadap perekonomian mencapai lebih dari Rp402 triliun. Nilai investasi melampaui Rp178 triliun serta mendorong tumbuhnya jaringan usaha langsung dan tidak langsung berupa usaha perdagangan, akomodasi, transportasi, dan makanan (DJBC, 2019).

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Selain berperan untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, untuk diubah menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan menambahkan nilai tambah lewat proses industri, IKM juga berperan banyak dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah sekitarnya. IKM cenderung lebih fleksibel dan tahan terhadap krisis global atau ekonomi (Ashari, 2017).

Yogyakarta termasuk daerah di Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Ini terlihat berdasarkan transaksi perdagangan yaitu komoditas nilai ekspor yang jauh lebih tinggi dari nilai impor. Komoditas yang potensial adalah mebel dan kerajinan kayu, pakaian jadi, sarung tangan, kerajinan perak, dan produk kerajinan lainnya (Misterexportir, 2019). Nilai ekspor DI Yogyakarta pada Januari 2020 mencapai US$38,6 juta, naik 4,61% dibanding ekspor Desember 2019. Jumlah ini meningkat 6,04% dibanding Januari 2019. Pakaian jadi bukan rajutan, perabot, penerangan rumah, dan barang-barang rajutan adalah kelompok komoditas yang nilai ekspornya paling tinggi. Sebaliknya filamen buatan, serat stafel buatan, dan kain tenunan khusus termasuk komoditas yang nilai impornya tercatat paling tinggi untuk periode Januari 2020 (BPS, 2020).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Yogyakarta merupakan salah satu kantor yang menyediakan fasilitas KITE IKM bagi industri kecil dan menengah di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, fasilitas tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh IKM yang terdaftar. Dari 12 perusahaan penerima fasilitas KITE IKM di KPPBC TMP B Yogyakarta, hanya 5 perusahaan saja yang melakukan realisasi ekspor selama tahun 2019. Di antara 5 perusahaan tersebut, terdapat 1 perusahaan yang tidak melakukan realisasi impor dengan menggunakan fasilitas KITE IKM. Fasilitas atau kemudahan ini tampaknya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Banyak kendala yang terjadi sehingga menyurutkan antusiasme dari industri untuk memanfaatkan secara optimal pemberian fasilitas dari pemerintah tersebut.

Ahmad *et al*. (2020) menyatakan bahwa terdapat beberapa hambatan penggunaan fasilitas IKM di Jawa Tengah, di antaranya adalah tingginya ketergantungan kepada penyalur, kesulitan dalam pemenuhan jangka waktu ekspor, rendahnya tingkat kepercayaan,

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

dan belum optimalnya sinergi antara otoritas terkait. Mumpuni (2019) menyebutkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi peluang UMKM untuk peningkatan kualitas hasil produksi serta penguatan perekonomian masyarakat. Kajian terkait KITE IKM telah banyak dilakukan, tetapi sejauh ini masih terbatas penelitian yang secara khusus membahas peran DJBC yakni KPPBC TMP B Yogyakarta dalam mendorong tumbuhnya IKM pengguna fasilitas KITE yang kegiatan pemasukan dan pengeluaran barangnya dilakukan melalui pelabuhan terdekat di luar wilayah kerja kantor Bea dan Cukai yang mengawasi. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi IKM di Yogyakarta.

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini ingin mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pemanfaatan fasilitas KITE oleh industri kecil dan menengah di Yogyakarta untuk kemudian mencari alternatif solusi dan memberi saran atas permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi pemikiran kepada DJBC yakni perannya mendorong pertumbuhan ekspor dalam negeri, terutama bagi IKM di Indonesia.

a. Rumusan Masalah

Penelitan ini mendalami kendala dan hambatan yang ditemui di lapangan atas belum optimalnya pemanfaatan fasilitas KITE IKM di Yogyakarta. Tulisan ini merupakan hasil evaluasi atas upaya KPPBC TMP B Yogyakarta dalam mendorong kegiatan ekspor yang dilakukan pelaku uaha dalam memanfaatkan fasilitas KITE IKM.

b. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul, melakukan analisis, dan memberikan alternatif penyelesaian terkait peran DJBC dalam memberikan layanan fasilitas KITE IKM di wilayah kerja KPPBC TMP B Yogyakarta.

2. KAJIAN LITERATUR

a. Pengertian Ekspor dan Impor

Secara umum ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri. Bila merujuk pada fungsinya, ekspor adalah salah satu bentuk perdagangan internasional (Putri, 2019). Ekspor terjadi apabila barang hasil produksi di satu negara dikirim ke negara lain baik dalam rangka untuk dijual atau diperdagangkan maupun tujuan lainnya. Tandjung (2011) menyebutkan ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri dengan mematuhi ketentuan di bidang kepabeanan.

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Sebaliknya, kegiatan impor dilakukan bila muncul kebutuhan atas suatu barang oleh suatu negara terhadap negara lain. Purwinto & Indriani (2019) menyebutkan impor merupakan kegiatan masuknya barang ke Indonesia oleh seorang individu atau pelaku usaha berbadan hukum melalui moda atau sarana pengangkut dimana terdapat kewajiban pabean yang harus dipenuhi yakni pembayaran perpajakan di bidang impor. Kegiatan ini dilakukan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Saat ini, aktivitas impor ditujukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan barang tertentu saja (Mumpuni, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepabeanan, ekspor adalah suatu usaha atau kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

b. Faktor Pendorong Ekspor

Salvatore (2007) menyebutkan beberapa faktor yang mendorong negara-negara untuk melakukan ekspor antara lain: harga barang, produk domestik bruto (PDB) per kapita, nilai tukar riil, dan jumlah populasi.

Jumlah UMKM, nilai tukar mata uang, kredit usaha rakyat, dan tingkat inflasi merupakan determinan ekspor industri kerajinan Indonesia (Rudianto dan Susilowati, 2019). Untuk jangka panjang, jumlah UMKM merupakan faktor dominan peningkatan ekspor, sedangkan pada jangka pendek besaran kredit usaha rakyat lebih dominan pengaruhnya.

c. Fasilitas KITE IKM

Hilangnya berbagai faktor yang menghambat transaksi atau jual beli internasional dianggap sebagai upaya paling tepat untuk mendorong peningkatan volume atau nilai ekspor suatu negara (Ianchovichina, 2004). Kebijakan berupa *duty drawback* yang telah diterapkan di Indonesia dengan istilah fasilitas KITE merupakan langkah efektif untuk peningkatan aktivitas ekspor. China dan Korea cukup berhasil menerapkan kebijakan ini (Mah[1], 2007; Mah[2], 2007).

Soemitro (1988) menyebutkan tidak sedikit kemudahan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha dan bisnis yang tidak selalu dalam bentuk keringanan pajak.

Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha adalah KITE yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu KITE pembebasan, KITE

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

pengembalian, dan KITE IKM. Berdasarkan PMK Nomor 110/PMK.04/2019, KITE IKM adalah kemudahan berupa pembebasan bea masuk serta pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas masuknya barang/bahan untuk diproses lebih lanjut, dirangkai, atau digabungkan dengan barang lain untuk tujuan ekspor maupun penyerahan hasil produksi. Sederhananya, KITE IKM merupakan kemudahan atau fasilitas berupa fiskal dan prosedural yang ditawarkan oleh pemerintah yang mana proses pelayanan dan pengawasannya dilakukan terutama oleh DJBC.

Winarno (2013) menyatakan fasilitas KITE dimaksudkan untuk mendorong laju volume ekspor, khususnya barang untuk kategori non migas.

d. Insentif Perpajakan dan Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menegah

Lestari *et al*. (2021) menyatakan insentif pajak dan dukungan pemerintah memiliki pengaruh pada kinerja UMKM. Kondisi ini didukung juga oleh penelitian Cheisviyanny (2020) bahwa insentif perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian kinerja usaha mikro, kecil dan menengah. Fasilitas KITE IKM merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada industri kecil dan menengah.

e. Pengukuran Kinerja dan Tata Kelola

Kinerja merupakan refleksi atas pencapaian implementasi atau pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan sebagai upaya terwujudnya tujuan, visi, dan misi suatu organisasi yang telah ditetapkan dalam suatu rencana strategis (Mahsun, 2009).

Pengukuran kinerja memiliki manfaat dan berdampak pada sisi internal dan eksternal organisasi, antara lain berupa: evaluasi pelaksanaan kinerja yaitu perbandingan hasil dengan rencana kerja untuk perbaikan kinerja, pemahaman atas proses bisnis, dan pengungkapan kendala atau masalah yang dihadapi (BPKP, 2000).

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan istilah *good governance* menurut United Nations adalah suatu wujud bentuk pertanggungjawaban negara, yakni konsep yang memiliki orientasi terhadap pembangunan sektor publik dan dilakukan oleh pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2002).

Fauzi (2020) mengatakan *good governance* adalah pertanggungjawaban pemerintah yakni kewenangan di bidang administrasi, ekonomi, dan politik untuk pengaturan masalah sosial di suatu negara. Prinsip tata kelola yang sejalan dengan

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

United Nations Development Programme (UNDP) di antaranya adalah peka dan tanggap terhadap apa yang dibutuhkan oleh *stakeholder*, terwujudnya suatu pertanggungjawaban atau akuntabilitas pelayanan, transparansi, serta memiliki visi dan misi yang berorientasi jangka panjang demi berlangsungnya suatu pembangunan yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Suatu teori tidak ditujukan semata sebagai cara untuk pengujian hipotesis, melainkan hanya sebagai *guidance* agar penelitian dapat fokus serta tidak melebar (Miller, 2007).

Studi ini melakukan tinjauan pustaka yang bersumber dari berbagai buku, artikel, modul, bahan ajar, dan beberapa tulisan di media *online*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus, yakni mendalami dengan cermat atas kejadian, aktivitas, dan proses suatu entitas (Creswell, 2012). Penelitian ini menjelaskan mengapa kemudahan impor berupa fasilitas KITE IKM belum dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah di Yogyakarta secara optimal.

Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan menerapkan metode semi terstruktur (*semi-structured interview*) kepada informan, yakni pegawai KPPBC TMP B Yogyakarta dan perwakilan pengguna jasa. Pendekatan ini memberikan keleluasaan agar tidak mengacu semata dengan butir pertanyaan yang telah disiapkan. Sugiyono (2010) menyatakan langkah ini digunakan agar bisa mengenali masalah lebih terbuka sehingga narasumber dapat mengemukakan pikiran atau pendapatnya. Studi ini dilakukan hanya kepada sebanyak 12 IKM yang telah terdaftar sebagai penerima fasilitas KITE hingga akhir tahun 2019. Pemilihan responden yang diwawancara menggunakan pendekatan *purposive sampling* dengan menentukan kriteria tertentu, yakni pegawai Bea dan Cukai yang selama ini memberikan layanan fasilitas KITE serta pengguna jasa penerima layanan.

Pengamatan dan observasi di lapangan juga dilakukan yang dilanjutkan dengan menyusun catatan berupa transkrip, serta mengkategorisasikan data. Semua aktivitas didokumentasi sebelum melakukan triangulasi data atas hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan studi pustaka. Selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam dengan menerapkan metode *interactive model* yang mengadopsi Miles dan Huberman (1994).

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan usaha yang telah mendapatkan ketetapan sebagai penerima fasilitas KITE IKM dapat melakukan impor barang atau bahan baku termasuk berupa material penolong dan pengemasnya, mesin produksi, dan barang contoh. Perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas pembebasan BM serta tidak dipungut PPN dan PPnBM. Dalam mengajukan impor barang tersebut, pengguna jasa harus mencantumkan kode fasilitas dalam dokumen impor yang diajukan agar mendapatkan fasilitas yang disebutkan.

Atas semua bahan baku yang diperoleh baik dari impor maupun lokal, badan usaha melakukan proses pengolahan, perakitan, dan pemasangan sehingga tercipta suatu barang produksi. Setiap penggunaan bahan baku, badan usaha wajib mempertanggungjawabkannya dalam laporan pertanggungjawaban bahan baku (BCLKT).

Gambar 1 berikut ini merupakan alur atau mekanisme pertanggungjawaban BCLKT mulai dari barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas masuk ke pabrik sampai dengan realisasi ekspor.

Gambar 1. Mekanisme Pertanggungjawaban BCLKT

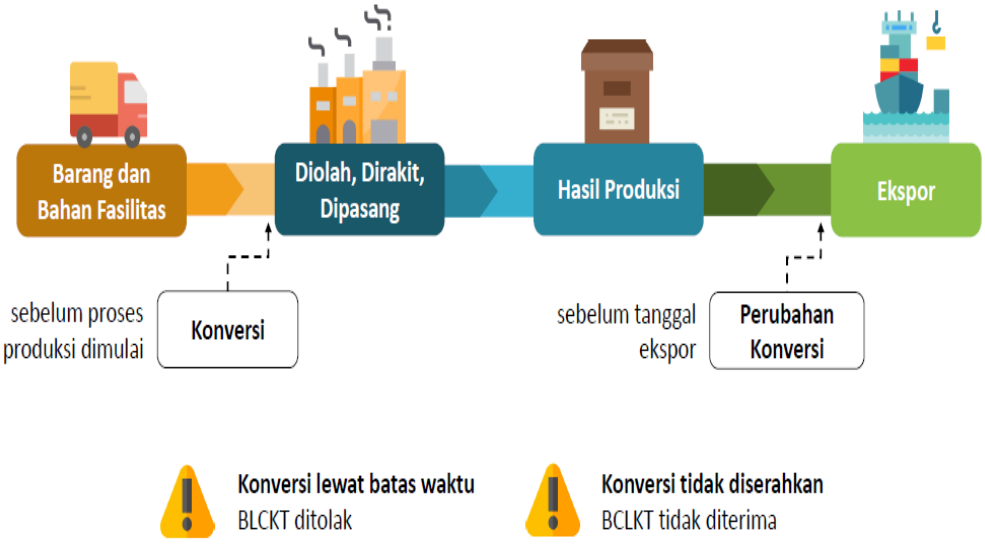

Sumber: Paparan Bahan Ajar PKN STAN, 2020

Keseluruhan hasil produksi badan usaha penerima fasilitas KITE IKM harus diekspor. Dalam pengajuan ekspor, badan usaha harus mencantumkan dokumen impor asal bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan barang produksi yang akan diekspor. Sebelum mengajukan ekspor, terdapat kewajiban IKM untuk melakukan

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

penyampaian konversi. Perubahan nilai konversi ini masih bisa dilakukan sepanjang belum dilakukan kegiatan ekspor. Setelah proses ekspor selesai, badan usaha harus memberikan laporan pertanggungjawaban pemakaian bahan baku asal impor yang sebelumnya dimasukkan menggunakan fasilitas KITE IKM kepada KPPBC TMP B Yogyakarta.

Wilayah kerja KPPBC TMP B Yogyakarta meliputi seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kota Yogyakarta, dan empat kabupaten yaitu Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Gunung Kidul. Wilayah kerja KPPBC TMP B dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Wilayah Kerja KPPBC TMP B Yogyakarta

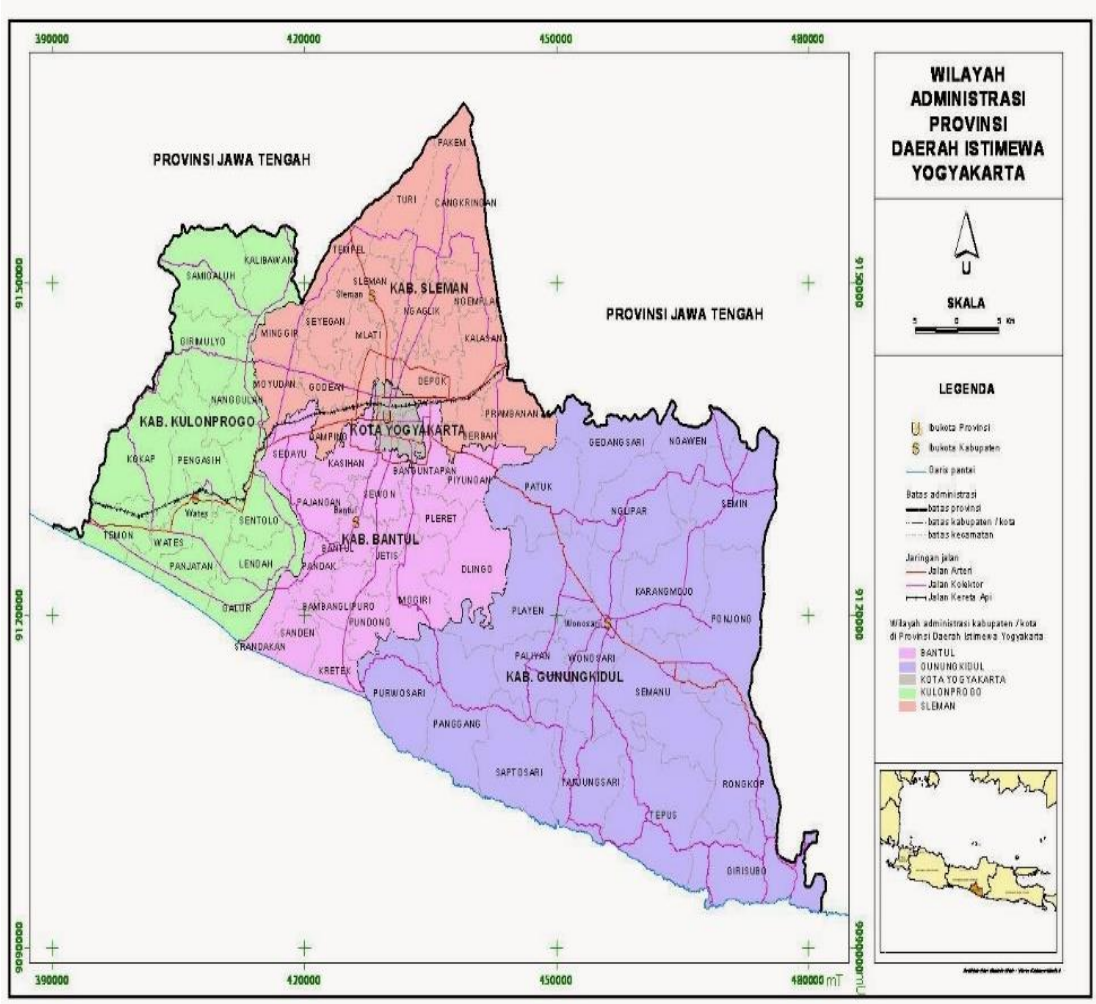

Sumber: KPPBC TMP B Yogyakarta, 2020

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

KPPBC TMP B Yogyakarta memiliki letak yang strategis sebagai kantor pelayan publik. Strategis yang dimaksud adalah karena letaknya secara geografis yang sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.

Kantor ini terletak tepat di tepi jalan raya besar yaitu Jalan Raya Jogja-Solo. Nilai strategis lain dari kantor ini adalah letaknya yang sangat berdekatan dengan Bandara Internasional Adisucipto. Keberadaan KPPBC TMP B Yogyakarta di Jalan Solo memudahkan pengguna jasa yang berada di lokasi yang berdekatan dengan kantor, untuk mengurus dokumen dan urusan kepabeanan lainya.

Namun, terdapat tantangan bagi pelaku usaha karena lokasi tempat pemasukan barang impor maupun ekspor berada di luar wilayah KPPBC TMP Yogyakarta yakni Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Terdapat 12 pengguna jasa yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KITE IKM per Desember 2019 di KPPBC TMP B Yogyakarta. Keseluruhan pengguna jasa tersebut memiliki fokus industri yang beragam dan tentunya ditujukan untuk tujuan ekspor sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Penerima Fasilitas KITE IKM

No	Nama IKM	Hasil Produksi
1	CV YKA	Dompet, tas, sabuk, kulit finish
2	PT OOA	Lotion dispenser, toilet brush
3	CV YG	Perhiasan perak dan logam, mannequin kayu, aneka produk koper untuk display
4	PT IR	Furnitur dan handycraft
5	PT H	Sarung tangan, tas, dompet, air bed, decker tangan
6	PT SCS	Sarung tangan
7	CV TP	Furniture dan kerajinan
8	PT PIF	Mebel
9	CV S	Furniture
10	CV BCM	Handycraft (tas)
11	CV DM	Handbags
12	PT NJI	Sarung tangan

Sumber: KPPBC TMP B Yogyakarta, 2020

Sebagian besar perusahaan menghasilkan kerajinan tangan yang masih konvensional dengan hanya sedikit bantuan dari mesin. Karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki jumlah pegawai yang cukup banyak sebagai konsekuensi dari metode konvensional yang digunakan.

Tidak semua penerima fasilitas KITE IKM memanfaatkan fasilitas yang

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

diberikan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah karena badan usaha tersebut masih baru ditetapkan statusnya sebagai penerima fasilitas KITE IKM.

Faktor lainnya adalah masih belum dibutuhkannya bahan baku material untuk proses produksi yang berasal dari impor. Sebagian besar badan usaha yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KITE IKM menjalankan industri di bidang barang kerajinan. Dengan adanya fasilitas KITE IKM, para pelaku industri kecil atau menengah di Yogyakarta dapat merasakan manfaat dan peningkatan skala ekonomi. Secara nasional, IKM mengalami pertumbuhan sebesar ±30% (Laporan Kinerja DJBC, 2017).

Selain itu, kebijakan KITE IKM telah memberikan dampak ekonomi berupa penanaman modal/investasi, penyerapan tenaga kerja, dan sebanyak 53% dari total perusahaan yang terdaftar telah melakukan impor fasilitas KITE IKM, serta 42% dari total IKM telah melakukan realisasi ekspor dengan fasilitas tersebut (DJBC, 2018).

Seluruh badan usaha yang mendapatkan status sebagai penerima fasilitas KITE IKM di Yogyakarta berawal dari proses pengajuan badan usaha untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Badan usaha cukup memenuhi segala persyaratan yang sudah ditentukan.

Langkah pertama yang dilakukan adalah badan usaha melakukan konsultasi dengan seksi pelayanan kepabeanan dan cukai dan membahas mengenai kesiapan badan usaha dalam hal persyaratan formil dan materiil. Selanjutnya, badan usaha mendaftarkan diri dan melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan sampai akhirnya ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE IKM.

Dari total 12 perusahaan yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KITE IKM di KPPBC TMP B Yogyakarta, ternyata belum semua industri yang tergolong kecil dan menengah ini memanfaatkan secara optimal fasilitas tersebut. Hanya 5 perusahaan yang melakukan realisasi ekspor pada tahun 2019 dan terdapat 1 pelaku usaha yang tidak memanfaatkan fasilitas KITE IKM berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah tidak dipungut. Hal ini dapat terlihat pada tabel 2 berikut.

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Tabel 2.
Realisasi Impor dan Ekspor Fasilitas KITE IKM di KPPBC TMP B Yogyakarta
Tahun 2019

No	Nama IKM	Realisasi Impor (USD)				Realisasi Ekspor (IDR)
		Nilai Pabean	BM yang dibebaskan	PPN Impor Tidak Dipungut	PPnBM Tidak Dipungut	
1	CV YKA	3.521,96	1.654.067	4.968.233	4.968.233	797.739.814,98
2	PT OOA	-	-	-	-	4.107.559.037,58
3	PT H	28.109,04	30.325.073	91.077.681	91.077.681	11.349.988.376,21
4	PT SCS	1.391,82	1.738.361	1.614.790	1.614.790	1.377.709.364,05
5	PT PIF	6.224,62	18.801.038	22.838.984	22.838.984	2.140.657.441,60

Sumber: KPPBC TMP B Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data di atas, tidak semua perusahaan penerima fasilitas KITE IKM memanfaatkan fasilitas yang diberikan dengan optimal. Hal ini ditengarai terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah badan usaha tersebut masih baru ditetapkan statusnya sebagai penerima fasilitas KITE IKM. Terdapat 3 perusahaan yang baru terdaftar sebagai penerima fasilitas KITE IKM pada tahun 2019. Faktor lainnya adalah masih belum dibutuhkannya bahan baku untuk proses produksi yang berasal dari impor. Selain itu, perbedaan tipe usaha yang dijalankan, modal yang dimiliki, serta *cash flow* perusahaan juga menyebabkan pelaku usaha yang tergolong kecil dan menengah ini belum memanfaatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor ini.

Sebenarnya ada 1 perusahaan lagi, yakni CV BCM yang cukup aktif melakukan kegiatan impor dan ekspor serta membuat laporan pertanggungjawaban pada awal tahun 2020, tetapi data terkait perusahaan ini tidak muncul pada Tabel 2 di atas. Faktanya, CV BCM belum melakukan realisasi impor dan ekspor pada tahun 2019 karena badan usaha tersebut baru mendapatkan Surat Keputusan KITE IKM pada Juli 2019 dan masih tergolong perusahaan baru. Data yang ditampilkan dalam Tabel 2 adalah laporan realisasi impor dan ekspor pada tahun 2019, sehingga CV BCM belum menunjukkan eksistensi keaktifannya.

Pada tabel tercantum PT OOA tidak melakukan impor namun melakukan realisasi ekspor pada tahun 2019. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2019 perusahaan ini melakukan kegiatan impor umum tanpa memanfaatkan fasilitas KITE IKM. Realisasi ekspor PT OOA pada tahun 2019 merupakan hasil dari

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

pengolahan bahan baku asal impor pada tahun 2018. Dari hasil penelusuran, badan usaha ini telah aktif dalam melakukan impor menggunakan fasilitas KITE IKM pada tahun 2017 dan 2018.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, secara umum pelaksanaan pelayanan dan pengawasan fasilitas KITE IKM sudah berjalan dengan baik. Ketika ditanyakan kepada salah satu pelaku usaha, jawaban yang diberikan juga mendukung hal ini. Salah satu perusahaan yang rutin datang ke KPPBC TMP B Yogyakarta tidak kurang dari 4 kali sebulan tersebut merasakan puas atas pelayanan Bea dan Cukai yang baik dan responsif. Petugas yang melayani juga aktif mencarikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang ada. Sebagian besar pelaku usaha datang untuk berdiskusi maupun melakukan kegiatan pemeriksaan fisik barang.

Namun, masih ditemukan beberapa hambatan atau kendala dalam mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah ini, terutama dalam memanfaatkan fasilitas atau kemudahan impor tujuan ekspor. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus agar terdapat upaya perbaikan secara terus menerus dan peningkatan kualitas atas pelayanan kepada pelaku usaha. Berikut ini beberapa permasalahan yang diidentifikasi baik itu bersumber baik dari internal maupun eksternal KPPBC TMP B Yogyakarta.

Faktor Internal

a. Sosialisasi Fasilitas KITE IKM

KPPBC TMP B Yogyakarta dianggap masih belum maksimal dalam upaya melakukan sosialisasi dan edukasi fasilitas KITE IKM ini kepada seluruh industri kecil dan menengah di Yogyakarta. Pada saat ini, kegiatan sosialisasi yang dilakukan masih tergolong pasif yakni menunggu adanya badan usaha baru yang mengajukan diri sebagai penerima fasilitas KITE IKM. Setelah badan usaha terdaftar, pihak Kantor Pabean mulai melakukan sosialisasi mengenai tata cara dan prosedur pemanfaatan fasilitas KITE IKM beserta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Pola pencarian sasaran potesial atau yang biasa dikenal dengan istilah “jemput bola” masih jarang dilakukan karena masih fokus dalam pembimbingan teknis kepada perusahaan yang sudah terdaftar. Pada akhir tahun 2019, hanya ada 12 pelaku usaha dan sebagian besar masih pasif dalam pemanfaatan fasilitas tersebut. Potensi ekspor dari DI Yogyakarta masih terbuka luas dan ini seharusnya menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan pemanfaatan fasilitas kemudahan impor

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

tujuan ekspor. Tabel 3 berikut menunjukkan 10 jenis industri UMKM di DI Yogyakarta yang tercatat memiliki nilai ekspor tertinggi selama kurun waktu 4 tahun terakhir.

Tabel 3.
Jenis Industri UMKM dengan Nilai Ekspor Tertinggi (dalam Juta USD)

No.	Jenis Industri	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Pakaian Jadi Tekstil	48,55	67,17	87,77	117,43
2.	Mebel Kayu	47,04	59,07	65,54	71,03
3.	Sarung Tangan Kulit	31,11	42,63	36,03	34,00
4.	STK Sintetis	9,13	10,33	12,79	15,66
5.	Papan Kemas	8,56	7,67	3,66	11,06
6.	Kerajinan Kertas	4,81	9,15	5,77	9,48
7.	Kerajinan Kayu	7,15	8,39	5,32	8,80
8.	Kerajinan Batu	3,97	6,14	5,32	5,51
9.	Kulit Disamak	5,52	3,72	3,83	4,82
10.	Teh Hijau / Hitam	3,92	2,58	3,32	3,25

Sumber: Aplikasi Dataku DI Yogyakarta, 2020

Apabila melihat data di atas, UMKM dengan industri pakaian jadi tekstil memiliki nilai ekspor tertinggi selama 4 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan data yang dimiliki KPPBC TMP B Yogyakarta, industri ini perlu mendapat perhatian khusus, terutama bagi eksportir atau badan usaha yang belum memanfaatkan fasilitas KITE IKM.

Ke depan, KPPBC TMP B Yogyakarta perlu melakukan sosialisasi dengan lebih masif dan aktif yakni melakukan upaya "jemput bola" atau sosialisasi kepada badan usaha potensial. Mengadakan kegiatan *gathering* dengan seluruh UKM di Yogyakarta yang melibatkan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Industri Perbankan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat bisa dilakukan. Kegiatan tersebut akan memberikan dampak baik bagi industri kecil dan menengah yang hadir, karena dengan mengikuti kegiatan tersebut wawasan mereka dapat lebih terbuka dan akan timbul semangat baru untuk lebih

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

mengembangkan industri dengan memanfaatkan fasilitas KITE IKM.

Selain itu KPPBC TMP B Yogyakarta juga dapat menyediakan stan khusus IKM *Corner* pada setiap *event* tertentu yang diadakan pemerintah daerah setempat. Informasi-informasi terkait fasilitas KITE IKM dapat dikemas dalam bentuk infografis atau video singkat. Lebih jauh bahkan bisa dipertimbangkan untuk mengadakan kerja sama dengan *public figure* atau tokoh masyarakat setempat agar gaung fasilitas berupa kemudahan impor yang ditawarkan oleh pemerintah dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas di Yogyakarta.

b. Tata Kelola dan Pengarsipan

Selanjutnya terkait tata kelola atau pengarsipan dokumen pada KPPBC TMP B Yogyakarta juga perlu ada perbaikan. Masalah ini ditemukan ketika melakukan tinjauan proses rekonsiliasi dokumen pabean atas impor yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha pengguna fasilitas KITE IKM. Pada saat itu, PT OOA memiliki permasalahan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban bahan baku impor. Pegawai KPPBC TMP B Yogyakarta yang menangani ini kesulitan menemukan dokumen impor untuk periode tahun-tahun sebelumnya. Sesuai UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, badan usaha sebenarnya diwajibkan untuk melakukan penyimpanan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan dalam kurun waktu 10 tahun.

Dalam rangka mendukung upaya *good governance* dan peningkatan pelayanan publik, KPPBC TMP B Yogyakarta perlu mematuhi ketentuan pengarsipan sesuai Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam tataran praktis, hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 1082/KM.1/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang mengatur ketentuan lama waktu arsip harus disimpan. Sebagai contoh dokumen Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) memiliki masa retensi aktif dan pasif selama lima tahun.

Dokumen impor atau ekspor ini perlu ditangani dengan baik guna kepentingan Bea dan Cukai ke depannya. Sesuai dengan penerapan *post clearance audit* di DJBC, semua dokumen impor dan ekspor perlu diadministrasikan dan disimpan dengan baik karena sewaktu-waktu diperlukan dalam hal ada kegiatan

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

pemeriksaan berupa penelitian ulang ataupun audit.

Lamanya mencari dokumen kepabeanan terkait pemanfaatan fasilitas KITE IKM ini berpotensi menyebabkan mundurnya penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor DJBC. Dampak keterlambatan pemeriksaan akibat pengelolaan arsip dokumen yang kurang baik pada akhirnya bisa mengakibatkan tidak dapat ditagihnya temuan hasil audit sehingga bisa menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara bagi DJBC (Muchtar & Utama, 2019). Permasalahan tata kelola dan pengarsipan ini perlu mendapat perhatian khusus KPPBC TMP B Yogyakarta.

c. Pengetahuan Teknis Petugas

Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah pengetahuan dan pemahaman pegawai KPPBC TMP Yogyakarta tentang fasilitas KITE IKM. Dari hasil pengamatan di lapangan, pengetahuan dan kompetensi teknis pegawai belum merata. Hal ini terkait faktor *rolling* atau rotasi pegawai yang dianggap terlalu singkat.

Pergantian atau *rolling* pegawai pada umumnya selama enam bulan sekali. Pegawai yang baru mengalami rotasi sering mengalami kendala atau kesulitan dalam memberikan layanan fasilitas KITE IKM ini.

Jumlah pegawai di KPPBC TMP B Yogyakarta per tanggal 31 Desember 2019 adalah 106 orang. Komposisi tingkat pendidikan pegawai KPPBC TMP B Yogyakarta terlihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3.
Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai

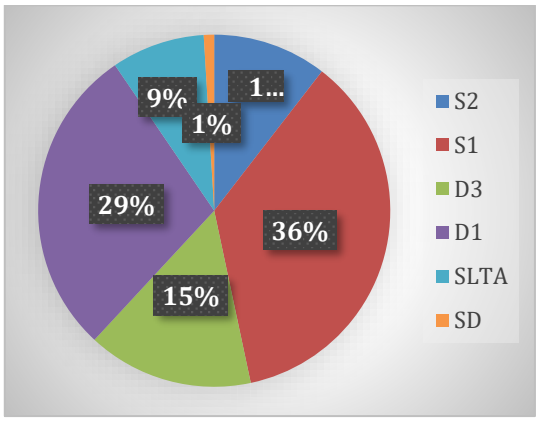

Sumber: KPPBC TMP B Yogyakarta, 2020

Berdasarkan gambar di atas, sebagian besar pegawai, yakni sekitar 54% tingkat pendidikannya adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma 1, dan Diploma 3 atau yang setara. Bahkan, ada pegawai yang yang tingkat pendidikannya masih level Sekolah Dasar. Para pegawai ini merupakan pegawai garda terdepan yang sehari-hari berhubungan dan berinteraksi dengan pengguna jasa. Tingkat pendidikan ini secara tidak langsung tentu memengaruhi pola pikir, pengetahuan dan kompetensi teknis pegawai, terutama

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

terkait proses layanan kepada pelaku usaha kecil dan menengah di Yogyakarta terhadap fasilitas KITE IKM. Tingkat pendidikan pegawai menceminkan pengetahuan, kemampuan intelektual dan jenis keterampilan yang dimilikinya. Berdasarkan penelitian, tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik (Wahyudi & Chamariyah, 2020).

Permasalahan belum meratanya pengetahuan dan kompetensi teknis pegawai ini sebenarnya bisa diatasi dengan mengatur pola rotasi pegawai yang menggunakan pertimbangan pengalaman, riwayat diklat yang pernah diikuti, dan potensi kemampuan pegawai. Alternatif lainnya adalah secara periodik perlu dilakukan *knowledge sharing* oleh pegawai senior atau yang sudah berpengalaman menangani fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Untuk dapat meningkatkan pengetahuan pegawai secara keseluruhan terutama mengenai materi fasilitas KITE IKM, KPPBC TMP B Yogyakarta dapat melaksanakan *in house training* mengenai KITE IKM dengan mengundang narasumber yang berasal dari Kantor Pusat DJBC atau kantor Bea dan Cukai lainnya yang sudah berhasil menangani fasilitas tersebut dengan baik.

d. Penerapan Manajemen Risiko

Terakhir adalah terkait kurang optimalnya implementasi manajemen risiko dalam proses pelayanan dan pengawasan atas pemanfaatan fasilitas KITE IKM di KPPBC TMP B Yogyakarta. Masih ditemukan kelemahan pada sistem aplikasi pengajuan pemberitahuan dokumen PIB terkait pengisian kolom fasilitas. Ditemukan suatu kasus yaitu salah satu penerima fasilitas KITE IKM tidak bisa memberikan pertanggungjawaban pemakaian bahan baku karena pada saat impor bahan baku, perusahaan tidak mencantumkan/mengisi kolom fasilitas. Ini berakibat perusahaan tersebut wajib membayar BM dan PPN/PPnBM terutang beserta sanksi administrasi berupa denda. Hal ini tentu sangat membebani industri kecil dan menengah. Seharusnya terdapat notifikasi sederhana pada modul pengguna jasa.

KPPBC TMP B Yogyakarta sebenarnya bisa mengantisipasi hal ini dengan melakukan identifikasi risiko atau potensi yang mungkin dihadapi oleh industri kecil dan menengah. Dengan penerapan manajemen risiko yang efektif tentu bisa dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Salah satu mitigasi yang bisa dilakukan adalah melakukan pendampingan atau *coaching*

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

dan Klinik IKM kepada industri kecil dan menengah ini secara lebih intens. Upaya ini dapat mengantisipasi kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas KITE IKM. Dengan adanya pendampingan, tentu proses identifikasi risiko dan permasalahan yang timbul mudah dideteksi oleh Bea dan Cukai sehingga bisa dilakukan langkah mitigasi risiko yang diperlukan. Pelaku usaha kecil dan menengah ini perlu mendapat bimbingan dan pembinaan secara terus menerus.

Faktor Eksternal

a. Pemahaman Pelaku Usaha atas Regulasi

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha atas prosedur atau ketentuan terkait fasilitas KITE IKM menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Ditemukan kasus adanya perusahaan yang melakukan perubahan data perusahaan tanpa pemberitahuan kepada KPPBC TMP B Yogyakarta. Hal ini terjadi karena perusahaan tersebut tidak memahami regulasi secara utuh dan komprehensif.

Selain itu, diketahui terdapat salah satu badan usaha yang mengeluarkan barang impor tanpa persetujuan dari Bea dan Cukai. Setelah didalami, kejadian ini terjadi karena banyak staf ekspor impor di perusahaan berganti personil atau pindah ke perusahaan lain. Akibatnya staf ekspor impor yang baru tidak mengetahui kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan terkait penggunaan fasilitas KITE IKM. Mereka tidak memiliki pemahaman yang baik sehingga memerlukan bimbingan dan pendampingan teknis kembali dari KPPBC TMP B Yogyakarta. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan pertemuan rutin secara periodik yaitu *coffee morning* dengan seluruh industri kecil dan menengah yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KITE IKM. Upaya lain berupa kegiatan *customs visit customer* ke perusahaan penerima fasilitas KITE IKM. Menurut pengamatan penulis, kegiatan *customs visit customer* masih kurang gencar dilakukan, padahal sebenarnya pengguna jasa sangat membutuhkan pendampingan lapangan secara langsung dari Bea dan Cukai.

b. Koordinasi antar-Instansi Terkait

Kurangnya koordinasi dan sinergi antara KPPBC TMP B Yogyakarta dengan instansi terkait lainya menjadi salah satu kendala penyebab pemanfaatan fasilitas KITE IKM oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah di Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY. Instansi

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

daerah yang biasa disingkat dengan sebutan DISKOP UKM DIY memiliki tugas melaksanakan fungsi pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas perbantuan lainnya. Diskop UKM terdiri dari empat bidang, yakni koperasi, UKM, kewirausahaan, dan pembiayaan.

Budaya pemerintahan dengan nama SATRIYA telah ditetapkan sebagai bentuk komitmen Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan transformasi birokrasi. SATRIYA diyakini sebagai watak seorang ksatria yaitu selalu berkomitmen dan memegang teguh nilai-nilai moral yang luhur. SATRIYA merupakan akronim dari selaras, akal budi, teladan, rela melayani, inovatif, yakin/percaya diri dan ahli atau profesional. Watak dan karakter ini hakikatnya sejalan dengan nilai atau budaya kerja di Kementerian Keuangan yakni: integritas, profesional, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kawasan yang kental akan budaya dan kerajinan di mana terdapat banyak industri kreatif di dalamnya. Industri kecil menengah banyak tersebar di Yogyakarta yang sebagian besar mengangkat produk unggulannya masing-masing sesuai dengan keahlian pelaku industri. Ini merupakan potensi yang perlu digali dan dikembangkan. Di sinilah perlu adanya peran sinergis dan strategis antara KPPBC TMP B Yogyakarta dan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koordinasi adalah suatu mekanisme untuk meyakinkan bahwa seluruh pihak terkait yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama telah mempunyai pemikiran dan pandangan yang sama (Gamatechno, 2019). Kesamaan pemikiran antara beberapa pihak terkait dapat terwujud dengan mengintegrasikan visi, misi, serta nilai yang dipedomani oleh semua otoritas. Koordinasi memiliki peranan yang penting karena koordinasi yang lemah berdampak pada menurunnya tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja. Harapan ke depan adalah ekspor dari pelaku usaha industri kecil dan menengah di Yogyakarta akan tumbuh dan berkembang.

4. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1) Secara umum pelaksanaan pelayanan dan pengawasan fasilitas KITE IKM di KPPBC TMP B Yogyakarta sudah

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

berjalan dengan baik dan pelaku usaha kecil dan menengah juga merasa puas dan terbantu atas pelayanan yang diberikan oleh petugas Bea dan Cukai.

2) Masih ditemukan beberapa hambatan atau kendala dalam mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah yang perlu mendapat perhatian khusus baik itu bersumber dari internal maupun eksternal KPPBC TMP B Yogyakarta.
3) Permasalahan internal terkait kurang gencar dan luasnya upaya sosialisasi dan edukasi fasilitas KITE IKM, lemahnya tata kelola atau pengarsipan dokumen kepabeanan, belum meratanya pengetahuan dan kompetensi teknis pegawai, dan kurang optimalnya penerapan manajemen risiko di KPPBC TMP B Yogyakarta.
4) Permasalahan eksternal terkait kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha atas prosedur atau ketentuan terkait fasilitas KITE IKM dan belum efektifnya sinergi serta koordinasi strategis dengan instansi atau lembaga daerah terkait.

b. Saran

Beberapa perbaikan yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1) Mengadakan kegiatan *gathering* dengan seluruh UMKM di Yogyakarta yang melibatkan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi UKM, Industri Perbankan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyediakan stan khusus IKM *Corner*.
2) Melakukan perbaikan pada tata kelola dan pengarsipan dokumen kepabeanan yang mengacu pada KMK No. 1082/KM.1/2013 tanggal 16 Desember 2013
3) Mengatur pola rotasi pegawai yang lebih efektif dan secara periodik menyelenggarakan *knowledge sharing* atau *in house training*.
4) Melakukan pendampingan atau *coaching* dan mengoptimalkan program *customs visit customer* ke perusahaan penerima fasilitas KITE IKM.
5) Melakukan koordinasi dan sinergi lebih intens dengan instansi daerah terkait terutama Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Keterbatasan penelitian dan implikasi

Objek penelitian ini hanya pada upaya DJBC mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah di wilayah Yogyakarta yang menjadi wilayah kerja

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

KPPBC TMP B Yogyakarta saja. Akan lebih komprehensif dan luas apabila objek penelitian dilakukan juga di beberapa kantor Bea dan Cukai dengan karakteristik yang berbeda meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran terkait hasil evaluasi atas peran DJBC dalam mendorong pertumbuhan IKM yang memanfaatkan fasilitas KITE.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, V., Violinda, Q., Indriasari, I. (2020). Strategi dengan Kekurangan Tugas untuk Membantu Mengembangkan Peningkatan Ekspor di Jawa Tengah. *Kinerja. 17 (1)*

Ashari, Muhammad. (2017). Presiden Luncurkan KITE IKM untuk Pengusaha Kecil. Diakses 30 September 2019 dari http://www.pikiranrakyat.com/ekonomi/2017/01/30/presiden-luncurkan-kite-ikmuntuk-pengusaha-kecil-392042

Badan Pusat Statistik Propinsi D.I. Yogyakarta. (2020). Perkembangan Ekspor dan Impor Daerah Istimewa Yogyakarta Januari 2020

Batavia dan Nandakumar. (2017). The Equivalence of Export Subsidies and Import Tariff Reduction in a Macroeconomic Model. The Journal of Economic Asymmetries 2017, 15, 76-80.

Benny, Jimmy. (2013). Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia, Jurnal EMBA Vol 1 No 4. ISSN: 2303-1174. Hal: 1406-1405.

Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. Indonesian Tax Journal , 21-28.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2017). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2017

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2018). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2018

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2019). Tuai Hasil Positif Bea Cukai Rilis Hasil Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. https://www.beacukai.go.id/berita/tuai-hasil-positif-bea-cukai-rilis-hasil-survei-dampak-ekonomi-fasilitas-kawasan-berikat-dan-kemudahan-impor-tujuan-ekspor.html

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). Bea Cukai Dorong Ekspor dengan Sosialisasikan KITE IKM. https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-dorong-ekspor-dengan-sosialisasikan-kite-ikm-pada-acara-lampung-craft-2020.html

Djamaludin., Aviasti., Rukmana, A.N. (2016). Peningkatan Kemampuan Usaha Kecil Menengah Di Wilayah Bandung Raya dalam Pemanfaaatan Internet sebagai Sarana Pemasaran dan Perluasan Jangkauan Pasar. Ethos (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat): 125-130

Fauzi, Arli. (2020, April 28). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Cerdika. https://cerdika.com/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik/

Gamatechno. (2019). 4 Indikator Penting Tata Kelola Pemerintahan yang

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

Baik. https://blog.gamatechno.com/4-indikator-penting-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik/

Ianchovichina, E. (2004). Trade policy analysis in the presence of duty drawbacks. The World Bank.

Kerr and Gaisford. (2012). Handbook on International Trade Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. "Akuntabilitas dan Good Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan". Jakarta: LAN dan BPKP

Lestari, D.S., Nurlaela, S., & Dewi, R.R. (2021). Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Boyolali. Ekombis. Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 3(1).

Mahsun, Mohamad. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE–Yogyakarta

Mah[1], J. S. (2007). Duty drawback and export promotion in China. The Journal of DevelopingAreas, 133-140

Mah[2], J. S. (2007). The effect of duty drawback on export promotion: The case of Korea. Journal of Asian Economics, 18(6), 967-973

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: ANDIOffset

Miles, M. B., Huberman, A. M., Huberman, M. A., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage

Miller, Gerald J. (2007). Kaifeng Yang Handbook of Research Methods in Public Administration, Second Edition Public Administration and Public Policy. CRC Press, Tailor & Francis Group

Misterexportir. (2019). Inilah Potensi Komoditas Expor Indonesia Wilayah Yogyakarta yang Wajib Diketahui. Diakses pada tanggal 26 Juni 2020 dari https://misterexportir.com/komoditas-ekspor-indonesia-wilayah-yogyakarta/

Muchtar, M., & Utama, P. (2020). Urgensi Audit Judgement pada Post Clearance Audit. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, 4(1). https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i1.760

Mumpuni, Mila. (2019). Kajian fasilitas KITE IKM bagi UMKM di wilayah Magelang. *Prosiding seminar nasional. Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*.

Purwinto, Ali & Indriani. (2019). Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Pabean. Bogor: Mitra Wacana Media

Putri, A. Sutrisni. (2019). Ekspor: Pengertian dan Manfaatnya. Diakses 9 Februari 2021 dari https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/145215469/ekspor-pengertian-dan-manfaatnya?page=all

Rudianto & Susilastuti, Darwati. (2019). Determinan Ekspor Industri Kerajinan Indonesia. Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019

Salvatore, D. (2007). Ekonomi internasional (9ed.). New Jersey: John Wiley & Sons

Soemitro, Rochmat. (1988). Pajak dan Pembangunan. Bandung: PT. ERESCO

Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D. Alfabeta: Bandung

Suryowati, Estu. (2020). *Akumindo Yakin Kontribusi UMKM Tahun ini Capai Rp 2.394,5 Triliun*. Diakses pada tanggal 7 Juli 2020 dari https://www.jawapos.com/ekonomi/16/01/2020/akumindo-yakin-

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

kontribusi-umkm-tahun-ini-capai-rp-2-3945-triliun/

Tandjung, M. (2011). Aspek dan Prosedur Ekspor - Impor. Jakarta: Salemba Empat.

Wahyudi, S., & Chamariyah, I.P. (2020). Pengaruh Komunikasi, Tingkat Pendidikan, dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Pelayanan di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Pamekasan. Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik. Vol. 3 No. 2

ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)
Copyright © 2021, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved